

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
NOMOR KEP-40/PK/2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN NOMOR KEP-16/PK/2024 TENTANG STANDAR
PELAYANAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN
KEUANGAN

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik serta penyesuaian terhadap kebutuhan pengguna layanan di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, perlu dilakukan perubahan terhadap standar pelayanan;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik, usulan perubahan, penghapusan, dan penambahan standar pelayanan dari unit pemilik layanan, serta hasil Forum Konsultasi Publik yang melibatkan pengguna layanan, perlu dilakukan penyempurnaan standar pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-16/PK/2024 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5337);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 509);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1208);
5. Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-16/PK/2024 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-60/PK/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-16/PK/2024 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;

Memperhatikan : Berita Acara nomor BA-1/FKP/2026 tentang Hasil Forum Konsultasi Publik Layanan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN NOMOR KEP-16/PK/2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN.

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-16/PK/2024 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-60/PK/2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-16/PK/2024 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal;
2. Direktur Dana Transfer Umum;
3. Direktur Dana Transfer Khusus;
4. Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan;
5. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah;
7. Direktur Sistem Perimbangan Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2026

Plt. DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN
KEUANGAN,



Ditandatangani secara elektronik
NUFRANSA WIRA SAKTI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN
NOMOR KEP-40/PK/2026
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN
KEUANGAN NOMOR KEP-16/PK/2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Standar Pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) terdiri atas Standar Pelayanan pada:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal

Standar Pelayanan pada Sekretariat Direktorat Jenderal meliputi 1 (satu) jenis pelayanan, yaitu:

- a. Layanan Konsultasi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Surat Permohonan Konsultasi dari Pengguna Layanan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; b. Permintaan informasi dari Pengguna Layanan.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Layanan informasi/konsultasi dapat dilakukan melalui: 1) Media Sosial DJPK a) Website: djpk.kemenkeu.go.id b) Instagram: @ditjenpk c) Facebook: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan d) X: @DitjenPK e) Tiktok: @ditjenpk f) Youtube: DitjenPK Kemenkeu RI. 2) Layanan Konsultasi <i>Video Conference</i> a) Microsoft Teams b) Aplikasi lainnya b. Prosedur konsultasi melalui Layanan Konsultasi <i>Video Conference</i> 1) Pengguna Layanan mengirimkan Surat Permohonan Konsultasi yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan pada laman

No.	Komponen	Uraian
		https://djpk.kemenkeu.go.id/ dan menu Hubungi Kami - Reservasi Layanan Konsultasi, disertai dengan: - identitas narahubung; - usulan waktu pelaksanaan; - topik atau isu yang akan dikonsultasikan secara spesifik; dan - daftar nama dan jabatan peserta yang akan mengikuti konsultasi. 2) Konfirmasi penjadwalan konsultasi melalui <i>video conference</i> dilaksanakan paling cepat 2 (dua) hari kerja sejak surat permohonan diterima, dengan mempertimbangkan ketersediaan narasumber DJPK. 3) DJPK akan menyampaikan konfirmasi penerimaan permohonan dan konfirmasi jadwal melalui media elektronik. 4) Konsultasi <i>video conference</i> dilaksanakan 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) minggu, dengan empat sesi konsultasi per harinya yang telah ditetapkan, yaitu pada pukul: 09.00 - 10.00 WIB; 10.00 - 11.00 WIB; 13.00 - 14.00 WIB; dan 14.00 - 15.00 WIB. Dalam hal seluruh sesi pada hari kerja yang dipilih telah terisi penuh, maka pelaksanaan konsultasi akan dijadwalkan pada hari kerja berikutnya yang masih tersedia. 5) Pelaksanaan konsultasi diharapkan memenuhi tata aturan yang berlaku pada prosedur layanan konsultasi yang diterapkan oleh DJPK dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan profesionalisme serta menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	- Media Sosial: paling cepat 1 (satu) hari kerja; dan - Konsultasi dilaksanakan paling cepat 2 (dua) hari kerja sejak surat permohonan diterima.
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada
5.	Produk Pelayanan	- Informasi dan konsultasi; dan - Saluran pengaduan.
6.	Penanganan Pengaduan,	Pengaduan, saran, dan masukan dapat dilakukan melalui:

No.	Komponen	Uraian
	Saran, dan Masukan	1. Telepon Kemenkeu PRIME: 134 2. WhatsApp: 081310004134 3. Email: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 4. Live Chat: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id 5. Layanan helpdesk terintegrasi Kementerian Keuangan: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id 6. Website: djpk.kemenkeu.go.id 7. Instagram: @ditjenpk 8. Facebook: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 9. X: @DitjenPK 10. Wise Kemenkeu: www.wise.kemenkeu.go.id 11. SP4N LAPOR!: www.lapor.go.id

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; c. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; d. Peraturan Menteri PAN/RB Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelayanan Publik; e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; dan f. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-3/PK/2019 tentang Tata Kelola Layanan Informasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
2.	Sarana, dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Komputer/laptop, aplikasi <i>Customer Relationship Management</i> , internet, web camera untuk komputer, alat tulis kantor, aplikasi untuk video conference, ruang rapat konsultasi DJPK, ruang kolaborasi yang ramah gender, disabilitas dan inklusi sosial (Gedsis).
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Menguasai bidang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD); dan b. Memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik (<i>communication skill</i>).

No.	Komponen	Uraian
4.	Pengawasan Internal	Standar Operasional Prosedur (SOP), dan pengawasan berjenjang lini pertama setiap bulan melalui laporan layanan informasi publik.
5.	Jumlah Pelaksana	11 (sebelas) orang
6.	Jaminan Pelayanan	a. DJPK memberikan pelayanan dengan menyediakan saluran layanan informasi dan konsultasi serta layanan pengaduan; b. Pemerintah Daerah, mitra kerja, dan masyarakat umum mendapatkan pelayanan maksimal; dan c. Peserta mendapatkan kompensasi permohonan maaf dalam hal terdapat layanan yang teridentifikasi tidak sesuai dengan standar layanan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Data Pelapor aduan terjamin kerahasiaannya; b. Tersedia alat pemadam kebakaran pada Ruang Kolaborasi DJPK; dan c. Terdapat kamera CCTV yang memonitor keamanan pelayanan pada Ruang <i>Video Conference</i> DJPK.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Pengguna Layanan dan <i>Individual Performance Review</i> .

2. Direktorat Dana Transfer Umum

Standar Pelayanan pada Direktorat Dana Transfer Umum meliputi 5 (lima) jenis pelayanan, yaitu:

b. Layanan Rekomendasi Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan

1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Dokumen syarat penyaluran yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah penerima alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Dokumen syarat penyaluran disampaikan sesuai dengan format pada peraturan yang berlaku; b. Prosedur pelaporan dokumen syarat penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan: 1) Pemerintah Daerah melaporkan dokumen syarat penyaluran yang ditandatangani oleh kepala daerah atau sekretaris daerah a.n. kepala daerah dengan mengirimkannya melalui: https://sikd.djpk.kemenkeu.go.id/ ;

No	Komponen	Uraian
		2) DJPK melakukan verifikasi terhadap dokumen syarat penyaluran yang telah diterima sampai dengan batas tanggal yang sudah ditentukan; 3) Apabila dokumen syarat penyaluran perlu perbaikan, maka DJPK akan menginformasikan kepada Pemerintah Daerah bersangkutan untuk dilakukan perbaikan; 4) Pemerintah Daerah memperbaiki dokumen syarat penyaluran dan melakukan input data yang telah diperbaiki; 5) DJPK melakukan verifikasi ulang hingga dinyatakan benar, kemudian akan diproses rekomendasi penyaluran.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen syarat penyaluran diterima lengkap.
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada.
5.	Produk Pelayanan	Hasil Rekomendasi Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat dilakukan melalui: 1. Telepon Kemenkeu PRIME: 134 2. WhatsApp: 081310004134 3. Email: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 4. Live Chat: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id 5. Layanan helpdesk terintegrasi Kementerian Keuangan: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id 6. Website: djpk.kemenkeu.go.id 7. Instagram: @ditjenpk 8. Facebook: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 9. X: @DitjenPK 10. Wise Kemenkeu: www.wise.kemenkeu.go.id 11. SP4N LAPOR!: www.lapor.go.id

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum; dan

No	Komponen	Uraian
		b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.
2.	Sarana, dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Komputer/laptop dan jaringan internet.
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Menguasai bidang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD); b. Menguasai peraturan dan kebijakan bidang Dana Bagi Hasil; dan c. Menguasai pengolahan <i>database</i> .
4.	Pengawasan Internal	Standar Operasional Prosedur (SOP), dan pengawasan berjenjang lini pertama.
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	a. Pemerintah Daerah mendapatkan pelayanan maksimal; dan b. Peserta mendapatkan kompensasi permohonan maaf dalam hal terdapat layanan yang teridentifikasi tidak sesuai dengan standar layanan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen syarat penyaluran tersimpan dalam <i>database</i> yang aman.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Pengguna Layanan dan <i>Individual Performance Review</i> .

c. Layanan Rekomendasi Penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Dokumen syarat penyaluran yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah penerima alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT).
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Dokumen syarat penyaluran disampaikan sesuai dengan format pada peraturan yang berlaku; b. Prosedur penyampaian dokumen syarat penyaluran:

No.	Komponen	Uraian
		1) Pemerintah Daerah melaporkan dokumen syarat penyaluran dengan mengirimkannya melalui: https://sikd.djpk.kemenkeu.go.id/; 2) DJPK melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan penyaluran yang telah diterima; 3) Apabila Dokumen perlu perbaikan, maka DJPK akan menginformasikan kepada Pemerintah Daerah bersangkutan untuk dilakukan perbaikan; 4) Pemerintah Daerah memperbaiki dokumen dan melakukan input data yang telah diperbaiki; 5) DJPK melakukan verifikasi ulang hingga dinyatakan benar, kemudian akan diproses rekomendasi penyaluran.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen syarat penyaluran diterima lengkap.
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada.
5.	Produk Pelayanan	Dokumen rekomendasi Penyaluran DBH CHT.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat dilakukan melalui: 1. Telepon Kemenkeu PRIME: 134 2. WhatsApp: 081310004134 3. Email: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 4. Live Chat: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id 5. Layanan helpdesk terintegrasi Kementerian Keuangan: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id 6. Website: djpk.kemenkeu.go.id 7. Instagram: @ditjenpk 8. Facebook: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 9. X: @DitjenPK 10. Wise Kemenkeu: www.wise.kemenkeu.go.id 11. SP4N LAPOR!: www.lapor.go.id

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum; dan

		b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2026 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Komputer/laptop, dan jaringan internet.
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Menguasai bidang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD); b. Menguasai peraturan dan kebijakan bidang Dana Bagi Hasil; dan c. Menguasai pengolahan <i>database</i> .
4.	Pengawasan Internal	Standar Operasional Prosedur (SOP), dan pengawasan berjenjang lini pertama.
5.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	a. Pemerintah Daerah menerima penyaluran DBH CHT sesuai peraturan perundang-undangan apabila dokumen syarat salur telah diterima sesuai dengan ketentuan; dan b. Peserta mendapatkan kompensasi permohonan maaf dalam hal terdapat layanan yang teridentifikasi tidak sesuai dengan standar layanan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen syarat penyaluran tersimpan dalam <i>database</i> yang aman.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Pengguna Layanan dan <i>Individual Performance Review</i> .

- c. Layanan Rekomendasi Penyaluran Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit
- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Dokumen syarat penyaluran yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah penerima alokasi Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (DBH Sawit).
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Dokumen syarat penyaluran disampaikan sesuai dengan format pada peraturan yang berlaku; b. Prosedur penyampaian dokumen syarat penyaluran: 1) Pemerintah daerah menyampaikan dokumen syarat penyaluran dengan mengirimkannya melalui tautan aplikasi

No.	Komponen	Uraian
		sikd.djpk.kemenkeu.go.id sampai dengan batas tanggal yang sudah ditentukan; 2) DJPK melakukan verifikasi terhadap dokumen syarat penyaluran yang telah diterima. c. Apabila dokumen syarat penyaluran belum diterima dengan lengkap atau perlu perbaikan: 1) DJPK menginformasikan kepada Pemerintah Daerah bersangkutan; 2) Pemerintah Daerah menyampaikan kelengkapan atau perbaikan dokumen syarat penyaluran kepada DJPK; 3) DJPK melakukan verifikasi ulang. Apabila dokumen lengkap, akan diproses rekomendasi penyaluran; d. Apabila dokumen syarat penyaluran diterima lengkap, DJPK memproses rekomendasi penyaluran DBH Sawit.
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	7 (tujuh) hari kerja sejak Dokumen syarat penyaluran diterima lengkap.
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada.
5.	Produk Pelayanan	Hasil Rekomendasi penyaluran DBH Sawit.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat dilakukan melalui: 1. Telepon Kemenkeu PRIME: 134 2. WhatsApp: 081310004134 3. Email: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 4. Live Chat: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id 5. Layanan helpdesk terintegrasi Kementerian Keuangan: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id 6. Website: djpk.kemenkeu.go.id 7. Instagram: @ditjenpk 8. Facebook: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 9. X: @DitjenPK 10. Wise Kemenkeu: www.wise.kemenkeu.go.id 11. SP4N LAPOR!: www.lapor.go.id

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit; dan

No.	Komponen	Uraian
		b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Komputer/laptop, dan jaringan internet.
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Menguasai bidang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD); b. Menguasai peraturan perundangan-undangan dan kebijakan bidang Dana Bagi Hasil; dan c. Menguasai pengolahan <i>database</i> .
4.	Pengawasan Internal	Standar Operasional Prosedur (SOP), dan pengawasan berjenjang lini pertama.
5.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	a. Pemerintah Daerah menerima penyaluran DBH Sawit sesuai peraturan perundangan apabila dokumen syarat salur telah diterima sesuai dengan ketentuan. b. Peserta mendapatkan kompensasi permohonan maaf dalam hal terdapat layanan yang teridentifikasi tidak sesuai dengan standar layanan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen syarat penyaluran tersimpan dalam <i>database</i> yang aman.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Pengguna Layanan dan <i>Individual Performance Review</i> .

- d. Layanan Rekomendasi Penarikan Dana *Treasury Deposit Facility* ke Rekening Kas Umum Daerah
- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Dokumen persyaratan penarikan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah pemilik akun Dana <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF).
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pemerintah Daerah menyampaikan dokumen persyaratan penarikan Dana TDF sesuai dengan format pada peraturan yang berlaku; b. Prosedur rewiu penarikan Dana TDF ke Rekening Kas Umum Daerah: 1) Pemerintah Daerah menyampaikan dokumen persyaratan penarikan TDF melalui Layanan helpdesk terintegrasi Kementerian Keuangan;

No.	Komponen	Uraian
		2) Setelah dokumen persyaratan diterima secara lengkap, DJPK melakukan reviu terhadap dokumen persyaratan penarikan Dana TDF; 3) Dokumen yang tidak lengkap akan dikonfirmasi/diinformasikan kepada pemerintah daerah bersangkutan; 4) Apabila dokumen persyaratan pengajuan penarikan Dana TDF perlu perbaikan, maka DJPK melakukan konfirmasi dan/atau menginformasikan kepada Pemerintah Daerah untuk dilakukan perbaikan; 5) Pemerintah Daerah memperbaiki dokumen persyaratan penarikan Dana TDF dan/atau mengirimkan kembali dokumen persyaratan pengajuan penarikan Dana TDF ke Layanan <i>helpdesk</i> terintegrasi Kementerian Keuangan; 6) Setelah dokumen perbaikan diterima lengkap, DJPK melakukan reviu hingga dinyatakan benar dan memproses rekomendasi penarikan Dana TDF.
3.	Jangka waktu penyelesaian	10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen diterima lengkap dengan mempertimbangkan kebijakan Menteri Keuangan yang berlaku.
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada.
5.	Produk Pelayanan	Hasil Rekomendasi Penarikan Dana <i>Treasury Deposit Facility</i> ke Rekening Kas Umum Daerah.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat dilakukan melalui: 1. Telepon Kemenkeu PRIME: 134 2. WhatsApp: 081310004134 3. Email: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 4. Live Chat: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id 5. Layanan helpdesk terintegrasi Kementerian Keuangan: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id 6. Website: djp.kemenkeu.go.id 7. Instagram: @ditjenpk 8. Facebook: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 9. X: @DitjenPK 10. Wise Kemenkeu: www.wise.kemenkeu.go.id 11. SP4N LAPOR!: www.lapor.go.id

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum; dan b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas <i>Treasury Deposit Facility</i> .
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Komputer/laptop dan jaringan internet.
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Menguasai bidang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD); b. Menguasai peraturan dan kebijakan di bidang Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum; c. Menguasai ketentuan terkait kebijakan Pengelolaan TDF; dan d. Menguasai pengolahan <i>database</i> .
4.	Pengawasan Internal	Standar Operasional Prosedur (SOP), dan pengawasan berjenjang lini pertama.
5.	Jumlah Pelaksana	4 (empat) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	a. Pemerintah Daerah mendapatkan pelayanan maksimal; dan b. Peserta mendapatkan kompensasi permohonan maaf dalam hal terdapat layanan yang teridentifikasi tidak sesuai dengan standar layanan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen persyaratan penarikan TDF dari Pemerintah Daerah, surat balasan kepada Pemerintah Daerah, nota dinas rekomendasi penarikan Dana TDF tersimpan dalam <i>database</i> yang aman.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Pengguna Layanan dan <i>Individual Performance Review</i> .

e. Layanan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum

1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Pembaharuan kebijakan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pemerintah Daerah dan/atau Kementerian/Lembaga menerima undangan kegiatan dari DJPK. b. Pemerintah Daerah dan/atau Kementerian/Lembaga menghadiri kegiatan

No	Komponen	Uraian
		dengan membawa surat tugas apabila hadir secara luring. c. Pemerintah Daerah dan/atau Kementerian/Lembaga menerima materi sosialisasi/bimbingan teknis. d. Pemerintah Daerah dan/atau Kementerian/Lembaga mengisi survei kepuasan penyelenggaraan kegiatan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) s.d. 3 (tiga) hari kerja.
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada.
5.	Produk Pelayanan	Sosialisasi/Bimbingan Teknis terkait Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat dilakukan melalui: 1. Telepon Kemenkeu PRIME: 134 2. WhatsApp: 081310004134 3. Email: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 4. Live Chat: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id 5. Layanan helpdesk terintegrasi Kementerian Keuangan: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id 6. Website: djpk.kemenkeu.go.id 7. Instagram: @ditjenpk 8. Facebook: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 9. X: @DitjenPK 10. Wise Kemenkeu: www.wise.kemenkeu.go.id 11. SP4N LAPOR!: www.lapor.go.id

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undangan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; b. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah; c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum;

No	Komponen	Uraian
		d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit; e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 22 Tahun 2026 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 16 Tahun 20226 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi; g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya;
2.	Sarana, dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Alat tulis kantor, komputer/laptop, dan jaringan internet.
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Menguasai bidang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD); b. Menguasai peraturan dan kebijakan bidang Dana Bagi Hasil; c. Menguasai peraturan dan kebijakan bidang Dana Alokasi Umum;
4.	Pengawasan Internal	Standar Operasional Prosedur dan pengawasan berjenjang lini pertama.
5.	Jumlah Pelaksana	6 (enam) s.d. 8 (delapan) orang
6.	Jaminan Pelayanan	a. Aparatur Pemerintah Daerah/Kementerian dan/Lembaga mendapatkan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan dana bagi hasil dan dana alokasi umum; dan b. Peserta mendapatkan kompensasi permohonan maaf dalam hal terdapat layanan yang teridentifikasi tidak sesuai dengan standar layanan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Database peserta bimbingan teknis/sosialisasi yang aman.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Pengguna Layanan dan <i>Individual Performance Review</i> .

3. Direktorat Dana Transfer Khusus

Standar Pelayanan pada Direktorat Dana Transfer Khusus meliputi 2 (dua) jenis pelayanan, yaitu:

- a. Layanan Rekomendasi Penyaluran Dana Alokasi Khusus Nonfisik

1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah penerima alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik). b. Surat Rekomendasi Penyaluran Dana Alokasi Khusus Nonfisik dari Kementerian/Lembaga (K/L);
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Untuk Rekomendasi yang bersumber dari laporan Pemerintah Daerah: 1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik, kecuali Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan dan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dalam bentuk dokumen elektronik (<i>softcopy</i>) melalui aplikasi terdiri dari: a) Laporan Tahunan untuk Dana Tunjangan Profesi Guru Aparatur Sipil Negara Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah, dan Dana Tunjangan Khusus Guru Aparatur Sipil Negara Daerah; b) Laporan Realisasi untuk Dana Bantuan Operasional Kesehatan Dinas dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Jenis Lainnya; yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan format pelaporan yang telah ditetapkan, melalui tautan: sikd.djpk.kemenkeu.go.id/lapordjpk/ 2) Prosedur pelaporan melalui aplikasi SIKDNG: a) Pemerintah Daerah melalui admin daerah yang telah didaftarkan pada aplikasi SIKDNG menyampaikan Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik dengan menginput laporan melalui aplikasi SIKDNG sesuai dengan format yang telah ditetapkan, kemudian mengirimkan hasil inputan dan mengunggah <i>softcopy</i> laporan yang sudah ditandatangani kepada admin pusat (DJPK); b) Admin pusat (DJPK) melakukan verifikasi terhadap Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang diterima; c) Apabila Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik perlu diperbaiki, maka admin pusat (DJPK) akan

No.	Komponen	Uraian
		menginformasikan hal-hal yang perlu diperbaiki dan merubah status laporan menjadi “perlu tindak lanjut” pada laporan Dana Alokasi Khusus Nonfisik; d) Pemerintah Daerah melakukan perbaikan atas laporan dan mengirimkan laporan yang telah diperbaiki; e) Admin pusat (DJPK) menerima laporan dan merubah status laporan menjadi “Dokumen sudah diterima dan benar”; b. Untuk rekomendasi yang bersumber dari surat rekomendasi Kementerian/Lembaga: Kementerian/Lembaga menyampaikan rekomendasi penyaluran melalui surat resmi, dalam hal mekanisme penyaluran langsung ke penerima manfaat; Berdasarkan butir 1 dan 2, admin Pusat (DJPK) menyusun dan menyampaikan nota dinas rekomendasi penyaluran ke Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran Dana Transfer Khusus melalui Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran Dana Transfer Khusus.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	a. 10 (sepuluh) hari kerja efektif untuk melakukan verifikasi atas laporan DAK Nonfisik yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang; b. 15 (lima belas) hari kerja efektif sejak syarat penyaluran diterima dengan lengkap dan benar untuk menyusun Nota Dinas Rekomendasi Penyaluran DAK Nonfisik.
4.	Biaya/Tarif	Tidak Ada
5.	Produk Pelayanan	Rekomendasi penyaluran dan/atau penghentian penyaluran DAK Nonfisik per jenis dana dan per gelombang setiap tahap penyaluran.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui: 1. Telepon Kemenkeu PRIME: 134 2. WhatsApp: 081310004134 3. Email: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 4. Live Chat: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id 5. Layanan helpdesk terintegrasi Kementerian Keuangan: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id 6. Website: djpk.kemenkeu.go.id

No.	Komponen	Uraian
		7. Instagram: @ditjenpk 8. Facebook: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 9. X: @DitjenPK 10. Wise Kemenkeu: www.wise.kemenkeu.go.id 11. SP4N LAPOR!: www.lapor.go.id

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; b. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah; c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.
2.	Sarana, dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Komputer/laptop, jaringan internet, dan aplikasi SIKDNG.
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Menguasai bidang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD); dan b. Menguasai peraturan dan kebijakan bidang Dana Alokasi Khusus Nonfisik.
4.	Pengawasan Internal	Standar Operasional Prosedur (SOP), dan pengawasan berjenjang lini pertama.
5.	Jumlah Pelaksana	7 (tujuh) orang
6.	Jaminan Pelayanan	a. Pemerintah Daerah mendapatkan pelayanan maksimal; dan b. Peserta mendapatkan kompensasi permohonan maaf dalam hal terdapat layanan yang teridentifikasi tidak sesuai dengan standar layanan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen syarat penyaluran tersimpan dalam ruang <i>database</i> yang aman.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Pengguna Layanan dan <i>Individual Performance Review</i> .

d. b. Layanan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Dana Alokasi Khusus.

1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Pembaharuan kebijakan Dana Alokasi Khusus
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pemerintah Daerah dan/atau Kementerian/Lembaga menerima undangan kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis dari DJPK; b. Pemerintah Daerah dan/atau Kementerian/Lembaga menghadiri kegiatan dengan membawa surat tugas; c. Pemerintah Daerah dan/atau Kementearian/Lembaga menerima materi sosialisasi/bimbingan teknis; dan d. Pemerintah Daerah dan/atau Kementerian/Lembaga mengisi survei kepuasan penyelenggaraan kegiatan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) s.d. 3 (tiga) hari kerja.
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada.
5.	Produk Pelayanan	Sosialisasi/Bimbingan Teknis terkait Dana Alokasi Khusus
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui: 1. Telepon Kemenkeu PRIME: 134 2. WhatsApp: 081310004134 3. Email: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 4. Live Chat: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id 5. Layanan helpdesk terintegrasi Kementerian Keuangan: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id 6. Website: djpk.kemenkeu.go.id 7. Instagram: @ditjenpk 8. Facebook: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 9. X: @DitjenPK 10. Wise Kemenkeu: www.wise.kemenkeu.go.id 11. SP4N LAPOR!: www.lapor.go.id

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; b. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah; c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;

No.	Komponen	Uraian
		d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik; dan e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.
2.	Sarana, dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Alat tulis kantor, komputer/laptop, dan jaringan internet.
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Menguasai bidang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD); b. Menguasai peraturan dan kebijakan bidang Dana Alokasi Khusus Fisik; c. Menguasai peraturan dan kebijakan bidang Dana Alokasi Khusus Nonfisik; dan d. Menguasai peraturan dan kebijakan bidang Hibah Kepada Daerah.
4.	Pengawasan Internal	Standar Operasional Prosedur, dan pengawasan berjenjang lini pertama.
5.	Jumlah Pelaksana	8 (delapan) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	a. Aparatur Pemerintah Daerah/Kementerian dan/atau Lembaga mendapatkan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus; dan b. Peserta mendapatkan kompensasi permohonan maaf dalam hal terdapat layanan yang teridentifikasi tidak sesuai dengan standar layanan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<i>Database</i> peserta bimbingan teknis yang aman.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Pengguna Layanan dan <i>Individual Performance Review</i> .

4. Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan

Standar Pelayanan pada Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan meliputi 6 (enam) jenis pelayanan, yaitu:

a. Layanan Penyusunan Rekomendasi Penyaluran Insentif Fiskal atas Kinerja Tahun Sebelumnya (Insentif Fiskal Reguler)

1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Rekomendasi Penyaluran Tahap I disusun setelah daerah penerima menyampaikan: a. Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran Berjalan; b. Rencana Penggunaan Insentif Fiskal; c. Laporan Realisasi Penyerapan Insentif Fiskal bagi Daerah yang mendapatkan Insentif Fiskal pada Tahun Anggaran Sebelumnya. Rekomendasi Penyaluran Tahap II disusun setelah daerah penerima menyampaikan: Laporan Realisasi Penyerapan Insentif Fiskal Tahap I dengan realisasi paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari dana yang telah disalurkan.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Persyaratan penyaluran disusun, disampaikan dan diverifikasi melalui portal Pelaporan Transfer ke Daerah pada Sistem Informasi Keuangan Daerah; b. Prosedur Penyusunan Rekomendasi Penyaluran Insentif Fiskal Reguler: 1) Pemerintah Daerah menyampaikan persyaratan penyaluran Insentif Fiskal melalui portal Pelaporan Transfer ke Daerah (TKD) pada Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD); 2) DJPK melakukan reviu atas laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan; 3) DJPK melakukan konfirmasi kepada Pemerintah Daerah jika syarat salur yang disampaikan belum sesuai dan mengembalikan melalui aplikasi SIKD; 4) Pemerintah Daerah melakukan perbaikan sesuai hasil reviu dan menyampaikan kembali kepada DJPK; 5) DJPK mengajukan rekomendasi penyaluran untuk daerah yang sudah memenuhi syarat salur kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen syarat salur diterima lengkap dan benar.
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada.
5.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Penyaluran Insentif Fiskal atas Kinerja Tahun Sebelumnya kepada daerah Penerima Insentif Fiskal atas Kinerja Tahun Sebelumnya.

No.	Komponen	Uraian
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui: 1. Telepon Kemenkeu PRIME: 134 2. WhatsApp: 081310004134 3. Email: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 4. Live Chat: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id 5. Layanan helpdesk terintegrasi Kementerian Keuangan: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id 6. Website: djp.kemenkeu.go.id 7. Instagram: @ditjenpk 8. Facebook: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 9. X: @DitjenPK 10. Wise Kemenkeu: www.wise.kemenkeu.go.id 11. SP4N LAPOR!: www.lapor.go.id

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; b. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah; dan c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah
2.	Sarana, dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Komputer/laptop, jaringan internet, dan Aplikasi SIKD.
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Menguasai bidang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD); dan b. Menguasai peraturan di bidang kebijakan Insentif Fiskal.
4.	Pengawasan Internal	Standar Operasional Prosedur (SOP), dan pengawasan berjenjang lini pertama.
5.	Jumlah Pelaksana	11 (sebelas) orang.

No.	Komponen	Uraian
6.	Jaminan Pelayanan	a. Rekomendasi penyaluran insentif fiskal atas kinerja tahun sebelumnya tepat waktu; dan b. Peserta mendapatkan kompensasi permohonan maaf dalam hal terdapat layanan yang teridentifikasi tidak sesuai dengan standar layanan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen Rekomendasi Penyaluran tersimpan dalam ruang <i>database</i> yang aman.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Pengguna Layanan dan <i>Individual Performance Review</i> .

b. Layanan Rekomendasi Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Rekomendasi Penyaluran Tahap I: Surat permintaan penyaluran tahap I dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta atau pejabat yang diberi kuasa, yang disertai dengan laporan tahunan. Surat tersebut disampaikan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Maret. b. Rekomendasi Penyaluran Tahap II: Surat permintaan penyaluran tahap II dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta atau pejabat yang diberi kuasa, yang disertai dengan: 1) Laporan realisasi penyerapan Dana Keistimewaan tahap I paling sedikit 80% (delapan puluh persen) yang telah diverifikasi oleh APIP Pemerintah Daerah; 2) Laporan pencapaian kinerja Dana Keistimewaan tahap I paling sedikit 80% (delapan puluh persen) yang telah diverifikasi oleh APIP Pemerintah Daerah. Dokumen tersebut disampaikan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan September. c. Rekomendasi Penyaluran Tahap III: Surat permintaan penyaluran tahap III dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta atau pejabat yang diberi kuasa, yang disertai dengan: 1) Laporan realisasi penyerapan Dana Keistimewaan tahap II paling sedikit 80% (delapan puluh persen) yang telah

No.	Komponen	Uraian
		diverifikasi oleh APIP Pemerintah Daerah; dan 2) Laporan pencapaian kinerja Dana Keistimewaan Tahap II paling sedikit 80% (delapan puluh persen) yang telah diverifikasi oleh APIP Pemerintah Daerah. Dokumen tersebut disampaikan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Desember.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Surat permintaan penyaluran Dana Keistimewaan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta atau pejabat yang diberi kuasa dan dokumen persyaratan penyaluran disampaikan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; b. Prosedur Penyusunan Rekomendasi Penyaluran Dana Keistimewaan: 1) Pemerintah Daerah menyampaikan persyaratan penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; 2) DJPK melakukan reviu atas laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan; 3) DJPK melakukan konfirmasi kepada Pemerintah Daerah jika syarat salur yang disampaikan belum sesuai dan mengembalikan kepada Pemerintah Daerah; 4) Pemerintah Daerah melakukan perbaikan sesuai hasil reviu dan menyampaikan kembali kepada DJPK; dan 5) DJPK mengajukan rekomendasi penyaluran untuk daerah yang sudah memenuhi syarat salur kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen syarat salur diterima lengkap dan benar.
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada.
5.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat dilakukan melalui: 1. Telepon Kemenkeu PRIME: 134 2. WhatsApp: 081310004134 3. Email: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 4. Live Chat: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id

No.	Komponen	Uraian
		5. Layanan helpdesk terintegrasi Kementerian Keuangan: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id 6. Website: djp.kemenkeu.go.id 7. Instagram: @ditjenpk 8. Facebook: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 9. X: @DitjenPK 10. Wise Kemenkeu: www.wise.kemenkeu.go.id 11. SP4N LAPOR!: www.lapor.go.id

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; b. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah; c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2.	Sarana, dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Komputer/laptop, jaringan internet, aplikasi penyaluran <i>Online Monitoring</i> Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara Transfer ke Daerah (OMSPAN TKD).
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Menguasai bidang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD); dan b. Menguasai peraturan di bidang kebijakan Dana Keistimewaan.
4.	Pengawasan Internal	Standar Operasional Prosedur (SOP), dan pengawasan berjenjang lini pertama.
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	a. Rekomendasi Penyaluran Dana Keistimewaan tepat waktu; dan b. Peserta mendapatkan kompensasi permohonan maaf dalam hal terdapat layanan yang teridentifikasi tidak sesuai dengan standar layanan.
7.	Jaminan Keamanan dan	Dokumen Rekomendasi Penyaluran tersimpan dalam ruang <i>database</i> yang aman.

No.	Komponen	Uraian
	Keselamatan Pelayanan	
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Pengguna Layanan dan <i>Individual Performance Review</i> .

c. Layanan Rekomendasi Penyaluran Dana Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur kepada Daerah Penerima Dana Otonomi Khusus

1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Pemerintah Daerah menyampaikan surat permohonan penyaluran dan dokumen syarat penyaluran Dana Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur tahap I kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan melampirkan: a. laporan tahunan pelaksanaan atas pengelolaan TKD untuk penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua tahun anggaran sebelumnya; b. Hasil validasi atas integrasi rencana anggaran dan program penggunaan penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus provinsi/kabupaten/kota yang telah disesuaikan dengan APBD; dan c. reviu APIP Daerah. Penyampaian dokumen syarat salur diterima paling lambat akhir bulan April tahun anggaran berjalan. Pemerintah Daerah menyampaikan surat permohonan penyaluran dan dokumen syarat salur Dana Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur tahap II kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan yang dilampiri dengan laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran, yang sesuai dengan RAP dan memuat: a. kinerja realisasi anggaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI tahap I tahun anggaran berjalan yang menunjukkan realisasi anggaran paling rendah 50 % (lima puluh persen) dari total dana yang telah disalurkan; b. kinerja capaian Keluaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI tahap I tahun anggaran berjalan yang menunjukkan capaian Keluaran paling rendah 15% (lima belas persen) dari total rencana Keluaran;

No.	Komponen	Uraian
		c. kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran atas penggunaan SiLPA Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI tahun anggaran sebelumnya; dan d. reviu APIP Daerah. Penyampaian dokumen syarat salur diterima paling lambat akhir bulan Juni tahun anggaran berjalan. Pemerintah Daerah menyampaikan surat permohonan penyaluran dan dokumen syarat salur Dana Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur tahap III kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan yang dilampiri dengan laporan kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran, yang sesuai dengan RAP dan memuat: a. kinerja realisasi anggaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI tahap II tahun anggaran berjalan yang menunjukkan realisasi anggaran paling rendah 70 % (tujuh puluh persen) dari total dana yang telah disalurkan; b. kinerja capaian Keluaran Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI tahap II tahun anggaran berjalan yang menunjukkan capaian Keluaran paling rendah 50% (lima puluh persen) dari total rencana Keluaran; c. kinerja realisasi anggaran dan capaian Keluaran atas penggunaan SiLPA Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan DTI tahun anggaran sebelumnya; dan d. reviu APIP Daerah. Penyampaian dokumen syarat salur diterima paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan. Dalam hal Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan belum menerima dokumen syarat salur Dana Otonomi Khusus dan DTI secara lengkap dan benar sampai dengan bulan November, penyaluran sisa pagu alokasi yang belum disalurkan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum akhir tahun anggaran berjalan.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Persyaratan penyaluran disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; b. Prosedur Penyusunan Rekomendasi Dana Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur:

No.	Komponen	Uraian
		1) Pemerintah Daerah menyampaikan persyaratan penyaluran Dana Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; 2) DJPK melakukan reviu atas dokumen persyaratan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan; 3) DJPK melakukan konfirmasi kepada Pemerintah Daerah jika dokumen syarat salur yang disampaikan belum sesuai dan mengembalikan kepada Pemerintah Daerah; 4) Pemerintah Daerah melakukan perbaikan sesuai hasil reviu dan menyampaikan kembali kepada DJPK; dan 5) DJPK menerbitkan rekomendasi penyaluran atas daerah yang sudah memenuhi syarat salur dengan lengkap dan benar kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen syarat salur diterima lengkap dan benar.
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada.
5.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Penyaluran Dana Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur kepada daerah Penerima Dana Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui: 1. Telepon Kemenkeu PRIME: 134 2. WhatsApp: 081310004134 3. Email: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id, otsus.ddiokk@kemenkeu.go.id, dan/atau timdanaotsusdjpk@gmail.com 4. Live Chat: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id 5. Layanan helpdesk terintegrasi Kementerian Keuangan: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id 6. Website: djpk.kemenkeu.go.id 7. Instagram: @ditjenpk 8. Facebook: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 9. X: @DitjenPK 10. Wise Kemenkeu: www.wise.kemenkeu.go.id 11. SP4N LAPOR!: www.lapor.go.id

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua; c. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah; d. Peraturan Pemerintah 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua; e. Peraturan Pemerintah 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua; dan f. Peraturan Menteri Keuangan nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dalam rangka Otonomi Khusus.
2.	Sarana, dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Komputer/laptop, jaringan internet, dan Aplikasi SIKD-OTSUS.
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Menguasai bidang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD); b. Menguasai peraturan di bidang kebijakan Dana Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur; dan c. Dapat mengoperasikan aplikasi SIKD Otonomi Khusus.
4.	Pengawasan Internal	Standar Operasional Prosedur (SOP), dan pengawasan berjenjang lini pertama.
5.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	a. Penyusunan rekomendasi penyaluran Dana Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur tepat waktu; dan b. Peserta mendapatkan kompensasi permohonan maaf dalam hal terdapat layanan yang teridentifikasi tidak sesuai dengan standar layanan.
7.	Jaminan Keamanan dan	Dokumen rekomendasi penyaluran tersimpan dalam ruang <i>database</i> yang aman.

No.	Komponen	Uraian
	Keselamatan Pelayanan	
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Pengguna Layanan dan <i>Individual Performance Review</i> .

d. Layanan Evaluasi Rencana Anggaran dan Program atas Penggunaan Dana Dalam Rangka Otonomi Khusus Bagian Provinsi

1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Permintaan Evaluasi RAP (Rencana Anggaran dan Program) Penggunaan Dana dalam rangka Otsus Bagian Provinsi melalui aplikasi SIKD-OTSUS; b. Surat Undangan Pelaksanaan FGD Evaluasi RAP Provinsi dari DJPK kepada Pemda dan K/L Teknis terkait; dan c. Surat Permohonan Narasumber Pelaksanaan FGD Evaluasi RAP Provinsi dari DJPK kepada K/L Teknis terkait.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	d. Pemerintah Provinsi di wilayah Papua menyusun RAP Otsus yang terdiri atas 1. Tambahan DBH Migas Otsus 2. Dana Otonomi Khusus yang bersifat umum (1%); 3. Dana Otonomi Khusus yang telah ditentukan penggunaannya (1,25%) 4. Dana Tambahan Infrastruktur (DTI). melalui aplikasi SIKD OTSUS (Papua) yang dapat diakses melalui link https://web.djpk.kemenkeu.go.id/login/ e. Pemerintah Provinsi menyampaikan Usulan RAP kepada DJPK melalui aplikasi SIKD OTSUS; f. Tim Reguler Dana Otsus DJPK melakukan koordinasi internal dan eksternal (melibatkan K/L Teknis yang terkait) untuk pelaksanaan Evaluasi Mandiri oleh masing-masing Evaluator selama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Usulan RAP dari Pemda Provinsi. Adapun proses Evaluasi Mandiri dilaksanakan melalui aplikasi SIKD-OTSUS sesuai akun masing-masing evaluator. Indikator evaluasi/penilaian sesuai dengan ketentuan evaluasi RAP Otsus sebagaimana diatur pada Pasal 24 ayat (4) PMK 33 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus;

No.	Komponen	Uraian
		g. Tim Reguler Dana Otsus DJPK menyusun Undangan FGD Evaluasi RAP kepada Pemda dan K/L Teknis terkait; h. Pelaksanaan FGD Evaluasi RAP sesuai jadwal dan waktu yang ditentukan, bertujuan untuk mengkonfirmasi kesesuaian hasil Evaluasi Mandiri dari masing-masing Evaluator kepada Pemda yang bersangkutan; i. Hasil dari FGD adalah Berita Acara Evaluasi/Penilaian per Jenis Dana Otsus yang berisi daftar kegiatan yang disepakati Telah Sesuai, Perlu Perbaikan atau Dihapus. Dokumen Berita Acara Evaluasi/Penilaian ini ditandatangani oleh DJPK, Pemda serta K/L Teknis terkait sebagai pedoman dalam perbaikan RAP Otsus; j. Pemda Provinsi melakukan Perbaikan RAP Otsus berdasarkan Berita Acara Evaluasi/Penilaian; k. Tim Reguler Dana Otsus DJPK melakukan koordinasi internal dan eksternal (melibatkan K/L Teknis terkait) untuk melakukan Evaluasi kembali atas RAP Perbaikan yang dikirimkan Pemda Provinsi paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterima RAP Perbaikan diterima di aplikasi SIKD OTSUS; l. RAP Perbaikan yang telah sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan menjadi RAP FINAL, namun apabila RAP Perbaikan belum sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan akan dikembalikan kepada Pemda Provinsi untuk diperbaiki kembali.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	a. Evaluasi Mandiri atas Usulan RAP sebelum pelaksanaan FGD Evaluasi RAP (sebelum keluar BA Evaluasi) adalah 7 (tujuh) hari kerja. b. Evaluasi Mandiri atas RAP Perbaikan pasca FGD Evaluasi RAP (setelah keluar BA Evaluasi) adalah 5 (lima) hari kerja.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	a. Berita Acara Hasil Evaluasi/Penilaian Rencana Anggaran dan Program Penggunaan Transfer ke Daerah untuk Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (RAP) Dana Otonomi Khusus Yang Bersifat Umum; b. Berita Acara Hasil Evaluasi/Penilaian Rencana Anggaran dan Program Penggunaan Transfer ke Daerah untuk Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (RAP) Dana Otonomi Khusus Yang Telah Ditentukan Penggunaannya;

No.	Komponen	Uraian
		c. Berita Acara Hasil Evaluasi/Penilaian Rencana Anggaran dan Program Penggunaan Transfer ke Daerah untuk Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (RAP) Dana Tambahan Infrastruktur; d. Berita Acara Hasil Evaluasi/Penilaian Rencana Anggaran dan Program Penggunaan Transfer ke Daerah untuk Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (RAP) Dana Tambahan DBH Migas dalam rangka Otsus; e. Rencana Anggaran dan Program Penggunaan Transfer ke Daerah untuk Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (RAP) Dana Otonomi Khusus Yang Bersifat Umum (FINAL); f. Rencana Anggaran dan Program Penggunaan Transfer ke Daerah untuk Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (RAP) Dana Otonomi Khusus Yang Telah Ditentukan Penggunaannya (FINAL); g. Rencana Anggaran dan Program Penggunaan Transfer ke Daerah untuk Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (RAP) Dana Tambahan Infrastruktur (FINAL); h. Rencana Anggaran dan Program Penggunaan Transfer ke Daerah untuk Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (RAP) Dana Tambahan DBH Migas dalam rangka Otsus (FINAL).
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui: 1. Telepon Kemenkeu PRIME: 134 2. WhatsApp: 081310004134 3. Email: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 4. Live Chat: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id 5. Layanan helpdesk terintegrasi Kementerian Keuangan: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id 6. Website: djp.kemenkeu.go.id 7. Instagram: @ditjenpk 8. Facebook: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 9. X: @DitjenPK 10. Wise Kemenkeu: www.wise.kemenkeu.go.id 11. SP4N LAPOR!: www.lapor.go.id

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua; b. Peraturan Pemerintah No. 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua; c. Peraturan Pemerintah No. 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua; dan d. Peraturan Menteri Keuangan No. 33 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus.
2.	Sarana, dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	a. Aplikasi SIKD OTSUS (Papua) yang dapat diakses di https://web.djpk.kemenkeu.go.id/danaotsus/login/ ; b. Aplikasi SIKD OTSUS (Aceh) yang dapat diakses di link https://sikd.kemenkeu.go.id; c. Perangkat komunikasi dan IT (komputer, internet, perangkat video conference); d. Aplikasi Zoom/Ms Team Meeting; e. Surat Undangan Pelaksanaan FGD Evaluasi RAP Provinsi dari DJPK kepada Pemda dan K/L Teknis terkait; dan f. Surat Permohonan Narasumber Pelaksanaan FGD Evaluasi Provinsi dari DJPK kepada K/L Teknis terkait.
3.	Kompetensi Pelaksana	d. Menguasai bidang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD); dan e. Menguasai peraturan di bidang kebijakan Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dalam rangka Otonomi Khusus.
4.	Pengawasan Internal	Standar Operasional Prosedur (SOP), dan pengawasan berjenjang lini pertama.
5.	Jumlah Pelaksana	a. Pelaksanaan Evaluasi serta FGD RAP Otsus terbagi dalam 4 room yang masing-masing membahas subkegiatan sesuai dengan jenis dana (Otsus 1% (1 persen), Otsus 1,25% (satu koma dua lima persen), DTI, dan Tambahan DBH Migas Otsus) sehingga kebutuhan petugas layanan minimal terdiri dari: 1. Ketua Tim Otsus, 2. 4 orang Jafung yang menjadi PIC pada 4 jenis dana otsus 3. 8-12 orang pelaksana yang didistribusikan pada 4 <i>room meeting</i> FGD sesuai dengan jenis dana otsus. b. Adapun petugas layanan ini bertanggung jawab atas pelaksanaan:

		1. Evaluasi Mandiri atas RAP Otsus (sebelum pelaksanaan FGD) 2. Evaluasi Mandiri atas Perbaikan RAP Otsus (setelah pelaksanaan FGD), di mana Perbaikan RAP Otsus bisa berkali-kali dilakukan sesuai dengan kepatuhan Pemda Provinsi terhadap Berita Acara yang telah disepakati bersama.
6.	Jaminan Pelayanan	a. Laporan disusun berdasarkan data yang valid dan hasil diskusi bersama Pemerintah Provinsi dengan DJPK; b. Konsultasi didokumentasikan dan dapat ditelusuri; dan c. Peserta mendapatkan kompensasi permohonan maaf dalam hal terdapat layanan yang teridentifikasi tidak sesuai dengan standar layanan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Informasi dilindungi sesuai aturan kerahasiaan dokumen negara; b. Pemerintah Daerah, mitra kerja, dan masyarakat umum mendapatkan pelayanan maksimal; dan c. Peserta mendapatkan kompensasi permohonan maaf dalam hal terdapat layanan yang teridentifikasi tidak sesuai dengan standar layanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Pengguna Layanan dan <i>Individual Performance Review</i> .

e. Layanan Fasilitasi Pemanfaatan Aplikasi SIKD Teman Desa untuk Kebutuhan Penyaluran Dana Desa

1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten/Kota memiliki akun akses SIKD Teman Desa. b. Data keuangan desa yang terinput dalam aplikasi keuangan desa berbasis elektronik. c. Data keuangan desa telah diverifikasi dan divalidasi oleh DPMD sesuai ketentuan yang berlaku.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. DPMD melakukan verifikasi data keuangan desa. b. DPMD melakukan integrasi/migrasi data keuangan desa dari aplikasi keuangan desa berbasis elektronik ke aplikasi SIKD Teman Desa melalui mekanisme interoperabilitas sistem. c. Dalam hal terdapat permasalahan atau pertanyaan dari DPMD maka akan dilakukan konfirmasi kepada DJPK. d. DJPK menanggapi permasalahan atau pertanyaan dari DPMD. e. Setelah tervalidasi pada SIKD Teman Desa, data secara otomatis diteruskan melalui pertukaran data

		ke aplikasi OMSPAN untuk kebutuhan penyaluran Dana Desa.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	15 (lima belas) hari kerja
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada
5.	Produk Pelayanan	a. Data keuangan desa yang terintegrasi dalam SIKD Teman Desa. b. Data <i>interoperable</i> yang terbaca dalam OMSPAN untuk kebutuhan penyaluran Dana Desa.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui: 1. Telepon Kemenkeu PRIME: 134 2. WhatsApp: 081310004134 3. Email: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 4. Live Chat: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id 5. Layanan helpdesk terintegrasi Kementerian Keuangan: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id 6. Website: djpk.kemenkeu.go.id 7. Instagram: @ditjenpk 8. Facebook: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 9. X: @DitjenPK 10. Wise Kemenkeu: www.wise.kemenkeu.go.id 11. SP4N LAPOR!: www.lapor.go.id

2) Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; b. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa dan perubahannya; c. Peraturan Pemerintah yang mengatur pengelolaan Dana Desa dan pengelolaan keuangan desa; dan d. Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa.
2.	Sarana, dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	a. Aplikasi SIKD Teman Desa; b. Aplikasi OMSPAN; c. Aplikasi keuangan desa berbasis elektronik; d. Komputer/laptop dan jaringan internet
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Menguasai bidang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD); b. Menguasai peraturan dan bidang kebijakan pengelolaan Dana Desa; c. Menguasai pengelolaan sistem informasi fiskal daerah dan desa; dan

		d. Menguasai pengolahan <i>database</i> .
4.	Pengawasan Internal	Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pengawasan berjenjang lini pertama.
5.	Jumlah Pelaksana	2 orang supervisor, 2 Orang PIC sistem informasi.
6.	Jaminan Pelayanan	a. Data diproses secara transparan, dapat ditelusuri (<i>traceable</i>), dan tepat waktu. b. Validasi dilakukan berbasis sistem untuk meminimalkan kesalahan manual. c. Integrasi dilakukan sesuai standar keamanan data pemerintah. d. Peserta mendapatkan kompensasi permohonan maaf dalam hal terdapat layanan yang teridentifikasi tidak sesuai dengan standar layanan.
7.	Jaminan Kemanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Terjaminnya keamanan data dan sistem oleh Kementerian Keuangan (<i>maintenance</i> dua layer oleh DJPK dan Pusintek); b. Dalam hal terdapat gangguan sistem, maka akan dilakukan <i>maintenance</i> .
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Pengguna Layanan dan <i>Individual Performance Review</i> .

f. Layanan Evaluasi dan Penilaian Rencana Program dan Kegiatan atas Penggunaan Dana Keistimewaan

1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Surat Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dana Keistimewaan DI Yogyakarta; b. Surat Undangan FGD Evaluasi dan Penilaian Usulan Awal Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan DIY kepada Pemda DIY; dan c. Surat Permohonan Narasumber FGD Evaluasi dan Penilaian Usulan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dana Keistimewaan DIY dari DJPK kepada K/L Teknis terkait.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta mengajukan rencana program dan kegiatan atas penggunaan Dana Keistimewaan kepada K/L Teknis terkait melalui aplikasi SIKD DAIS yang dapat diakses melalui link sbb: https://web.djpk.kemenkeu.go.id/bimtekdaais/login/ dengan pengajuan paling lambat pada hari kerja terakhir di bulan Januari tahun anggaran sebelumnya; b. DJPK melakukan koordinasi internal dan eksternal (melibatkan K/L Teknis terkait) untuk pelaksanaan evaluasi mandiri melalui aplikasi SIKD-DAIS oleh

No	Komponen	Uraian
		masing-masing <i>Evaluator</i> sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c. DJPK menyampaikan Undangan FGD Evaluasi dan Penilaian Usulan Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan DIY kepada Pemda dan Surat Permohonan Narasumber FGD Evaluasi dan Penilaian Usulan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dana Keistimewaan DIY dari DJPK kepada K/L Teknis terkait; d. Pelaksanaan FGD Evaluasi dan Penilaian Usulan Program dan Kegiatan sesuai jadwal dan waktu yang ditentukan, bertujuan untuk mengkonfirmasi kesesuaian hasil Evaluasi Mandiri dari masing-masing <i>Evaluator</i> kepada Pemda DIY; e. Melakukan proses penyusunan dan penetapan Berita Acara Evaluasi dan Penilaian per urusan Dana Keistimewaan yang berisi daftar kegiatan yang disepakati. Dokumen Berita Acara Evaluasi dan Penilaian ditandatangani oleh DJPK, Pemda serta K/L Teknis terkait; f. Pemda DIY melakukan Perbaikan Usulan Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan berdasarkan Berita Acara Evaluasi dan Penilaian; g. Usulan Program dan Kegiatan Perbaikan yang telah sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan menjadi Usulan Program dan Kegiatan Final.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 (tiga puluh) hari kerja sejak rencana program dan kegiatan atas penggunaan Dana Keistimewaan diterima.
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada.
5.	Produk Pelayanan	a. Berita Acara Penilaian Usulan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dana Keistimewaan DIY Urusan/Kewenangan Kebudayaan; b. Berita Acara Penilaian Usulan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dana Keistimewaan DIY Urusan/Kewenangan Kelembagaan; c. Berita Acara Penilaian Usulan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dana Keistimewaan DIY Urusan/Kewenangan Tata Ruang; d. Berita Acara Penilaian Usulan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dana Keistimewaan DIY Urusan/Kewenangan Pertanahan; e. Berita Acara Penilaian Usulan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dana Keistimewaan DIY Urusan/Kewenangan Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;

No	Komponen	Uraian
		f. Program dan Kegiatan atas Penggunaan Dana Keistimewaan DIY Urusan/Wewenang Kebudayaan; g. Program dan Kegiatan atas Penggunaan Dana Keistimewaan DIY Urusan/Wewenang Kelembagaan; h. Program dan Kegiatan atas Penggunaan Dana Keistimewaan DIY Urusan/Wewenang Tata Ruang; i. Program dan Kegiatan atas Penggunaan Dana Keistimewaan DIY Urusan/Wewenang Pertanahan; j. Program dan Kegiatan atas Penggunaan Dana Keistimewaan DIY Urusan/Wewenang Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat dilakukan melalui: 1. Telepon Kemenkeu PRIME: 134 2. WhatsApp: 081310004134 3. Email: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 4. Live Chat: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id 5. Layanan helpdesk terintegrasi Kementerian Keuangan: https://kemenkeuprime.kemenkeu.go.id 6. Website: djp.kemenkeu.go.id 7. Instagram: @ditjenpk 8. Facebook: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 9. X: @DitjenPK 10. Wise Kemenkeu: www.wise.kemenkeu.go.id 11. SP4N LAPOR!: www.lapor.go.id

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; b. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah; c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2.	Sarana, dan Prasarana,	a. Aplikasi SIKD DAIS yang dapat diakses di https://web.djp.kemenkeu.go.id/bimtekdaais/login/;

No	Komponen	Uraian
	dan/atau Fasilitas	b. Perangkat komunikasi dan IT (komputer, internet, perangkat video conference); dan c. Aplikasi Zoom/Ms Team Meeting.
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Menguasai bidang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD); dan b. Menguasai peraturan di bidang kebijakan Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dalam rangka Keistimewaan.
4.	Pengawasan Internal	Standar Operasional Prosedur (SOP), dan pengawasan berjenjang lini pertama
5.	Jumlah Pelaksana	Pelaksanaan Evaluasi serta FGD Evaluasi dan Penilaian Usulan Program dan Kegiatan Dana Keistimewaan DIY terbagi dalam beberapa room yang masing-masing membahas Urusan Kebudayaan, Urusan Kelembagaan, Urusan Tata Ruang, Urusan Pertanahan, dan Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; sehingga kebutuhan petugas layanan minimal terdiri dari: a. Ketua Tim Reguler Insentif Fiskal dan Keistimewaan, b. 3 orang Jafung, dan c. 6-10 orang pelaksana yang didistribusikan pada beberapa <i>room meeting</i> FGD sesuai dengan urusan/kewenangan.
6.	Jaminan Pelayanan	a. Laporan disusun berdasarkan data yang valid dan hasil diskusi bersama Pemerintah DIY dan K/L Teknis terkait dengan DJPK; b. Konsultasi didokumentasikan dan dapat ditelusuri; dan c. Peserta mendapatkan kompensasi permohonan maaf dalam hal terdapat layanan yang teridentifikasi tidak sesuai dengan standar layanan.
7.	Jaminan Kemanan dan Keselamatan Pelayanan	a. Informasi dilindungi sesuai aturan kerahasiaan dokumen negara; b. Pemerintah Daerah, mitra kerja, dan masyarakat umum mendapatkan pelayanan maksimal; dan c. Peserta mendapatkan kompensasi permohonan maaf dalam hal terdapat layanan yang teridentifikasi tidak sesuai dengan standar layanan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Pengguna Layanan dan <i>Individual Performance Review</i> .

5. Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Standar Pelayanan pada Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah meliputi 4 (empat) jenis pelayanan, yaitu:

- a. Layanan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
 - 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Surat Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dengan melampirkan paling sedikit: 1) Latar belakang dan penjelasan paling sedikit memuat: a) Dasar pertimbangan penetapan tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b) Proyeksi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan potensi; dan c) Dampak terhadap kemudahan berusaha; 2) Berita Acara/Naskah Persetujuan Bersama antara DPRD dan Kepala Daerah. b. Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Surat Penyampaian Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dengan melampirkan paling sedikit: 1) Salinan digital Peraturan Daerah dalam bentuk <i>Portable Document Format</i> (PDF); dan 2) Salinan digital Peraturan Daerah dalam format aplikasi pengolah kata (<i>Word Processor</i>).
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pemerintah Daerah (gubernur/bupati/walikota) menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta syarat kelengkapannya; b. DJPK melakukan konfirmasi kepada Pemerintah Daerah jika syarat evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disampaikan belum sesuai; c. Pemerintah Daerah menyampaikan kekurangan syarat kelengkapan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada DJPK; d. DJPK melakukan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang

No.	Komponen	Uraian
		disampaikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan; e. Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disampaikan kepada Provinsi bersangkutan; dan f. Dalam hal hasil evaluasi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah teridentifikasi perlu diubah dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, DJPK memberikan rekomendasi perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	e. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: 12 (dua belas) hari kerja sejak Rancangan Peraturan Daerah diterima lengkap dan benar; f. Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: 20 (dua puluh) hari kerja sejak Peraturan Daerah diterima lengkap dan benar.
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada.
5.	Produk Pelayanan	Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui: 1. Telepon Kemenkeu PRIME: 134 2. WhatsApp: 081310004134 3. Email: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 4. Live Chat: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id 5. Layanan helpdesk terintegrasi Kementerian Keuangan: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id 6. Website: djpk.kemenkeu.go.id 7. Instagram: @ditjenpk 8. Facebook: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

No.	Komponen	Uraian
		9. X: @DitjenPK 10. Wise Kemenkeu: www.wise.kemenkeu.go.id 11. SP4N LAPOR!: www.lapor.go.id

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan b. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Sarana, dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Komputer/laptop dan jaringan internet.
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Menguasai bidang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD); b. Menguasai peraturan dan kebijakan bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan c. Menguasai peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4.	Pengawasan Internal	Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pengawasan berjenjang lini pertama.
5.	Jumlah Pelaksana	54 (lima puluh empat) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	a. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tepat waktu; dan b. Peserta mendapatkan kompensasi permohonan maaf dalam hal terdapat layanan yang teridentifikasi tidak sesuai dengan standar layanan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen tersimpan dalam ruang <i>database</i> yang aman.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Pengguna Layanan dan <i>Individual Performance Review</i> .

b. Layanan Penyusunan Rekomendasi Penyelesaian atas Permasalahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Surat dari <i>stakeholder</i> terkait Permasalahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. <i>Stakeholder</i> menyampaikan surat terkait Permasalahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b. DJPK melakukan identifikasi permasalahan, penelaahan, dan melakukan pengumpulan bahan; dan c. DJPK menerbitkan surat rekomendasi penyelesaian atas Permasalahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	15 (lima belas) hari kerja sejak surat terkait Permasalahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diterima DJPK.
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada.
5.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Penyelesaian atas Permasalahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui: 1. Telepon Kemenkeu PRIME: 134 2. WhatsApp: 081310004134 3. Email: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 4. Live Chat: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id 5. Layanan helpdesk terintegrasi Kementerian Keuangan: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id 6. Website: djpk.kemenkeu.go.id 7. Instagram: @ditjenpk 8. Facebook: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 9. X: @DitjenPK 10. Wise Kemenkeu: www.wise.kemenkeu.go.id 11. SP4N LAPOR!: www.lapor.go.id

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

No.	Komponen	Uraian
		b. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan c. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Sarana, dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Komputer/laptop dan jaringan internet.
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Menguasai bidang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD); b. Menguasai peraturan dan kebijakan bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan c. Menguasai peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4.	Pengawasan Internal	Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pengawasan berjenjang lini pertama.
5.	Jumlah Pelaksana	54 (lima puluh empat) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	a. <i>Stakeholder</i> mendapatkan penyelesaian atas permasalahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan b. Peserta mendapatkan kompensasi permohonan maaf dalam hal terdapat layanan yang teridentifikasi tidak sesuai dengan standar layanan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen tersimpan dalam ruang <i>database</i> yang aman.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Pengguna Layanan dan <i>Individual Performance Review</i> .

c. Layanan Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Modernisasi Administrasi Perpajakan Daerah

1. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Pembaharuan kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pemerintah Daerah menerima undangan Bimbingan Teknis/Sosialisasi dari DJPK; b. Pemerintah Daerah menyampaikan konfirmasi kehadiran kepada DJPK;

No.	Komponen	Uraian
		c. Pemerintah Daerah menghadiri kegiatan dengan membawa surat tugas; d. Pemerintah Daerah melaksanakan <i>post-test</i> terkait materi yang telah disampaikan DJPK dalam kegiatan yang telah dilaksanakan; dan e. Pemerintah Daerah mengisi survei evaluasi pelaksanaan kegiatan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) s.d. 3 (tiga) hari kerja.
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada.
5.	Produk Pelayanan	Bimbingan teknis modernisasi administrasi perpajakan daerah
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat dilakukan melalui: 1. Telepon Kemenkeu PRIME: 134 2. WhatsApp: 081310004134 3. Email: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 4. Live Chat: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id 5. Layanan helpdesk terintegrasi Kementerian Keuangan: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id 6. Website: djp.kemenkeu.go.id 7. Instagram: @ditjenpk 8. Facebook: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 9. X: @DitjenPK 10. Wise Kemenkeu: www.wise.kemenkeu.go.id 11. SP4N LAPOR!: www.lapor.go.id

2. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan b. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2.	Sarana, dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Alat tulis kantor, komputer/laptop, dan jaringan internet.

No.	Komponen	Uraian
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Menguasai bidang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD); b. Menguasai peraturan perundang-undangan dan kebijakan bidang PDRD.
4.	Pengawasan Internal	Standar Operasional Prosedur (SOP), dan pengawasan berjenjang kini pertama.
5.	Jumlah Pelaksana	8 (delapan) s.d. 9 (sembilan) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	a. Pemerintah Daerah mendapatkan pelayanan maksimal, peningkatan kapasitas dalam pengelolaan PDRD, dan optimalisasi penerimaan PDRD; dan b. Peserta mendapatkan kompensasi permohonan maaf dalam hal terdapat layanan yang teridentifikasi tidak sesuai dengan standar layanan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<i>Database</i> peserta bimibingan teknis/sosialisasi yang aman.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Pengguna Layanan dan <i>Individual Performance Review</i> .

d. Layanan Penyusunan Rekomendasi Penyetoran Pajak Rokok.

- 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Laporan Realisasi Penyaluran Bagi Hasil Pajak Rokok dari Pemerintah Provinsi ke Kabupaten/Kota.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Pemerintah Daerah menyampaikan dokumen syarat penyaluran sesuai dengan format pada peraturan yang berlaku kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; b. Prosedur penyusunan Rekomendasi Penyetoran Pajak Rokok: 1) Gubernur menyampaikan laporan realisasi penyaluran bagi hasil Pajak Rokok dari provinsi ke kabupaten/kota atas realisasi Pajak Rokok yang diterima oleh provinsi pada periode penyetoran sebelumnya secara elektronik dan/atau dokumen fisik. 2) DJPK melakukan reviu kesesuaian laporan realisasi penyaluran bagi hasil Pajak Rokok dari provinsi ke Kabupaten/ Kota sesuai dengan ketentuan;

No	Komponen	Uraian
		3) DJPK melakukan koordinasi kepada Pemerintah Daerah jika laporan realisasi penyaluran bagi hasil Pajak Rokok belum sesuai dan mengembalikan melalui aplikasi Pajak Rokok; 4) Pemerintah Daerah melakukan perbaikan sesuai hasil revidi dan menyampaikan kembali kepada DJPK; 5) DJPK menerbitkan rekomendasi penyetoran Pajak Rokok atas daerah yang sudah memenuhi syarat secara lengkap dan benar, sesuai dengan periode penyetoran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen syarat salur diterima lengkap dan benar, sesuai dengan periode penyetoran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada
5.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Penyetoran Pajak Rokok dari KPA BUN Penerimaan dan Pemotongan Pajak Rokok ke KPA BUN Penyetoran Pajak Rokok.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan, saran, dan masukan dapat dilakukan melalui: 2. Telepon Kemenkeu PRIME: 134 3. WhatsApp: 081310004134 4. Email: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 5. Live Chat: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id 6. Layanan helpdesk terintegrasi Kementerian Keuangan: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id 7. Website: djp.kemenkeu.go.id 8. Instagram: @ditjenpk 9. Facebook: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 10. X: @DitjenPK 11. Wise Kemenkeu: www.wise.kemenkeu.go.id 12. SP4N LAPOR!: www.lapor.go.id

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; b. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemungutan, Pematangan, dan Penyetoran Pajak Rokok.
2.	Sarana, dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Komputer/laptop, jaringan internet, dan Aplikasi SIKD-Pajak Rokok
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Menguasai bidang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD); b. menguasai peraturan dan kebijakan bidang PDRD; c. menguasai peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan PDRD; dan d. mampu mengoperasikan aplikasi SIKD Pajak Rokok.
4.	Pengawasan Internal	Standar Operasional Prosedur (SOP), dan pengawasan berjenjang lini pertama.
5.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	Penetapan Rekomendasi Penyetoran Pajak Rokok bagi Pemerintah Daerah
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen tersimpan dalam ruang <i>database</i> yang aman.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Layanan DJPK, dan <i>Individual Performance Review</i>

6. Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah

Standar Pelayanan pada Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah meliputi 1 (satu) jenis pelayanan, yaitu:

- a. Layanan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengelola Keuangan Daerah
 - 1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Pendaftaran peserta bimbingan teknis disertai dengan dokumen persetujuan atasan langsung

No.	Komponen	Uraian
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Prosedur bimbingan teknis Pengelola Keuangan Daerah: - Pendaftaran calon peserta berdasarkan pengumuman pelaksanaan bimbingan teknis; - Seleksi calon peserta bimbingan teknis; - Pengumuman definitif peserta bimbingan teknis; - Petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan teknis sebagai panduan persiapan dan pelaksanaan bimbingan teknis; - Pelaksanaan pre test dan post test penyelenggaraan bimbingan teknis; dan - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	- Pengumuman definitif peserta bimbingan teknis disampaikan 5 (lima) hari kerja setelah pendaftaran ditutup; - Penyelenggaraan bimbingan teknis terbagi atas: - Bimbingan teknis secara luring (tatap muka) durasi minimal 26 (dua puluh enam) jam dalam lingkup 5 (lima) hari kerja; - Bimbingan teknis secara daring (pembelajaran jarak jauh) durasi minimal 18 (delapan belas) jam dalam lingkup 3 (tiga) hari kerja; dan - Penyampaian sertifikat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan bimbingan teknis selesai.
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada
5.	Produk Pelayanan	Bimbingan teknis reguler Pengelola Keuangan Daerah
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui: - Telepon Kemenkeu PRIME: 134 - WhatsApp: 081310004134 - Email: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id - Live Chat: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id - Layanan helpdesk terintegrasi Kementerian Keuangan: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id - Website: djpk.kemenkeu.go.id - Instagram: @ditjenpk - Facebook: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan - X: @DitjenPK - Wise Kemenkeu: www.wise.kemenkeu.go.id

No.	Komponen	Uraian
		11.SP4N LAPOR!: www.lapor.go.id

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
2.	Sarana, dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Alat tulis kantor, komputer/laptop, jaringan internet, <i>website e-learning</i> bimbingan teknis DJPK, WhatsApp <i>Group</i> kelas bimbingan teknis, ruang kelas bimbingan teknis, serta modul dan materi bimbingan teknis.
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Menguasai bidang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD); b. Menguasai bidang manajemen pembelajaran; dan c. Memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik (<i>communication skill</i>).
4.	Pengawasan Internal	Standar Operasional Prosedur (SOP), pakta integritas, dan pengawasan berjenjang lini pertama.
5.	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	a. Aparatur Pemerintah Daerah mendapatkan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan keuangan daerah; b. Peserta Bimbingan teknis yang dinyatakan lulus mendapatkan Sertifikat Bimbingan teknis; dan c. Peserta mendapatkan kompensasi permohonan maaf dalam hal terdapat layanan yang teridentifikasi tidak sesuai dengan standar layanan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<i>Database</i> peserta bimbingan teknis tersimpan dengan aman.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Pengguna Layanan dan <i>Individual Performance Review</i> .

7. Direktorat Sistem Perimbangan Keuangan
Standar Pelayanan pada Direktorat Sistem Perimbangan Keuangan meliputi 2 (dua) jenis pelayanan, yaitu:

a. Layanan Penyampaian APBD Murni melalui Interkoneksi dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah

1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	a. Lembar Pernyataan Pelaksanaan Penyediaan Data Transaksi Pemerintah Daerah dan penunjukkan admin; dan b. Infrastruktur Pendukung.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Tahap Konfirmasi dan Pemutakhiran Aplikasi 1. DJPK menyampaikan kuesioner kepada Pemerintah daerah mengenai aplikasi keuangan daerah yang digunakan oleh Pemda dari mulai perencanaan penganggaran sampai dengan pelaporan dan penatausahaan. 2. Pemda mengisi kuesioner sebagai bentuk konfirmasi dan Pemutakhiran aplikasi keuangan daerah 3. DJPK melakukan rekapitulasi aplikasi yang tekah disampaikan Pemda untuk selanjutnya dilakukan proses interkoneksi dengan SIKD yang dilakukan oleh Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan (BaTii) Kementerian Keuangan 4. DJPK menerima informasi dari BaTii mengenai aplikasi keuangan daerah yang telah terinterkoneksi dengan SIKD. b. Tahap Pelaksanaan Verifikasi dan Otorisasi APBD Murni secara mandiri oleh pemerintah daerah melalui interkoneksi-Sistem Informasi Keuangan Daerah 1. DJPK menerbitkan surat permintaan APBD Murni kepada pemerintah daerah; 2. Pemerintah daerah menyampaikan Portable Document Format dan Arsip Data Komputer APBD Murni paling lambat 31 Januari; 3. Pemerintah daerah melakukan verifikasi dan otorisasi APBD Murni secara mandiri melalui interkoneksi-Sistem Informasi Keuangan Daerah; 4. DJPK menerima data APBD Murni yang sudah diotorisasi oleh pemerintah daerah dan sudah tersedia di database Sistem Informasi Keuangan Daerah;
3.	Jangka Waktu Pelayanan	a. 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya informasi dari Pemda untuk tahap konfirmasi dan pemutakhiran aplikasi keuangan daerah dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah

No.	Komponen	Uraian
		b. 5 (lima) hari kerja untuk pelaksanaan verifikasi dan otorisasi APBD Murni secara mandiri oleh pemerintah daerah melalui interkoneksi-Sistem Informasi Keuangan Daerah
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada.
5.	Produk Pelayanan	Penyampaian APBD Murni melalui Interkoneksi dengan SIKD.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui: 1. Telepon Kemenkeu PRIME: 134 2. WhatsApp: 081310004134 3. Email: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 4. Live Chat: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id 5. Layanan helpdesk terintegrasi Kementerian Keuangan: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id 6. Website: djpk.kemenkeu.go.id 7. Instagram: @ditjenpk 8. Facebook: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 9. X: @DitjenPK 10. Wise Kemenkeu: www.wise.kemenkeu.go.id 11. SP4N LAPOR!: www.lapor.go.id

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; b. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional; c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Platform Digital Sinergi Kebijakan Fiskal Nasional; dan f. Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan nomor PER-1/PK/2023 tentang Proses Bisnis Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Laporan Data Bulanan, dan

No.	Komponen	Uraian
		Laporan Pemerintah Daerah Lainnya Melalui Interkoneksi Data Transaksi Pemerintah Daerah.
2.	Sarana, dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Komputer/laptop, <i>server</i> dan <i>storage</i> , jaringan internet, dan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah.
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Menguasai bidang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD); dan b. Menguasai Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan Akuntansi.
4.	Pengawasan Internal	Standar Operasional Prosedur (SOP), dan pengawasan berjenjang lini pertama.
5.	Jumlah Pelaksana	30 (tiga puluh) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	a. Mendapatkan pelayanan maksimal; b. Memperoleh informasi penyampaian data APBD; c. Dapat melakukan pengecekan data APBD melalui aplikasi berbasis <i>web</i> dan <i>mobile</i> ; dan d. Peserta mendapatkan kompensasi permohonan maaf dalam hal terdapat layanan yang teridentifikasi tidak sesuai dengan standar layanan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Data APBD Murni tersimpan dalam perangkat <i>server</i> dan <i>storage</i> pada <i>Smart Data Center</i> dan <i>Data Recovery Center</i> Kementerian Keuangan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Pengguna Layanan dan <i>Individual Performance Review</i> .

b. Layanan Verifikasi Penyampaian Laporan Realisasi Belanja Pegawai sebagai Syarat Penyaluran Bagian Dana Alokasi Umum yang Tidak Ditentukan Penggunaannya

1) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Laporan realisasi belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan tambahan penghasilan atau dengan nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibayarkan kepada PNSD dan PPPK Daerah.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	a. Laporan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

No.	Komponen	Uraian
		b. Prosedur laporan realisasi belanja pegawai sebagai dokumen syarat penyaluran bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya: 1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan dengan menginput data serta unggah dokumen laporan pada aplikasi SIKD/aplikasi yang telah ditentukan; 2) DJPK melakukan verifikasi terhadap dokumen laporan yang telah diterima pada aplikasi SIKD/aplikasi yang telah ditentukan; 3) Apabila diperlukan perbaikan pada laporan yang disampaikan, maka DJPK akan menginformasikan kepada Pemerintah Daerah untuk dilakukan perbaikan; 4) Pemerintah Daerah memperbaiki laporan dan/atau input data serta mengunggah kembali dokumen laporan pada aplikasi SIKD/Aplikasi yang telah ditentukan; dan 5) DJPK melakukan verifikasi ulang hingga dinyatakan benar, kemudian akan ditindaklanjuti dengan penerbitan nota dinas penyampaian laporan realisasi belanja pegawai kepada Direktorat DTU untuk diterbitkan rekomendasi penyaluran DAU yang tidak ditentukan penggunaannya.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	maksimal 6 hari kerja setelah laporan diterima yang dihitung sejak berakhirnya bulan laporan berkenaan dan/atau maksimal 6 (enam) hari kerja setelah laporan diterima pada bulan berjalan dengan ketentuan penyampaian laporan maksimal tanggal 10 setiap bulan berjalan.
4.	Biaya/Tarif	Tidak ada.
5.	Produk Pelayanan	Hasil verifikasi Laporan realisasi belanja pegawai PNSD dan PPPK Daerah berupa gaji dan tunjangan tambahan penghasilan atau dengan nama lain sesuai dengan ketentuan.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui: 1. Telepon Kemenkeu PRIME: 134 2. WhatsApp: 081310004134 3. Email: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id 4. Live Chat: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id 5. Layanan helpdesk terintegrasi Kementerian Keuangan: https://kemenkeu-prime.kemenkeu.go.id 6. Website: djp.kemenkeu.go.id

No.	Komponen	Uraian
		7. Instagram: @ditjenpk 8. Facebook: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 9. X: @DitjenPK 10. Wise Kemenkeu: www.wise.kemenkeu.go.id 11. SP4N LAPOR!: www.lapor.go.id

2) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi meliputi:

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
2.	Sarana, dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Komputer/laptop dan jaringan internet.
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Menguasai bidang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD); b. Menguasai peraturan dan kebijakan bidang Dana Alokasi Umum; c. Menguasai menggunakan aplikasi SIKD; d. Menguasai Microsoft Office Excel; dan e. Menguasai komunikasi persuasive yang baik.
4.	Pengawasan Internal	Standar Operasional Prosedur (SOP), dan pengawasan berjenjang lini pertama.
5.	Jumlah Pelaksana	9 (sembilan) orang.
6.	Jaminan Pelayanan	a. Pemerintah Daerah mendapatkan pelayanan maksimal dan optimal; b. Peserta mendapatkan kompensasi permohonan maaf dalam hal terdapat layanan yang teridentifikasi tidak sesuai dengan standar layanan; dan c. Peserta mendapatkan kompensasi permohonan maaf dalam hal terdapat layanan yang teridentifikasi tidak sesuai dengan standar layanan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen pelaporan tersimpan dalam database yang aman.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survei Kepuasan Pengguna Layanan dan <i>Individual Performance Review</i> .

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal [@TanggalND]

Plt. DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN
KEUANGAN,



Ditandatangani secara elektronik
NUFRANSA WIRA SAKTI

